



**PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA**

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
2021
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Wojo, bangunharjo, sewon, Bantul
Telp. (0274)4396412 Fax. (0274)4396415
Email : pt.yogya@gmail.com Website : pt-yogyakarta.go.id
YOGYAKARTA 55187

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 ini dapat kami sajikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama tahun 2021, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta diuraikan mengenai pencapaian (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2021.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2021, mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mencapai Sasaran strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan Sasaran strategis tersebut dengan melaksanakan program-program tersebut secara optimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 telah disusun namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



[Signature]
Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Daftar Isi

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Yogyakarta	12
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	13
2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.....	25
B. Pengelolaan Keuangan	37
C. Pengelolaan SAKIP	39
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis	viii
Tabel.2 Rencana Kinerja Tahun 2021	9
Tabel.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
Tabel.4 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta	12
Tabel.5 Target, Realisasi dan capaian sasaran Strategis 1	13
Tabel.6.1 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara yang diselesaikan.....	14
Tabel.6.2 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	14
Tabel.6.3 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	15
Tabel.6.4 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara Tipikor yang diselesaikan	15
Tabel 7.1 : Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan	16
Tabel 7.2 : Perbandingan Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan.....	16
Tabel 7.3 : Perbandingan Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	17
Tabel 7.4 : Perbandingan Sisa Perkara Tipikor yang diselesaikan	17
Tabel 8.1 : Evaluasi Tri Wulan Perkara yang diselesaikan tepat waktu	18
Tabel 8.2 : Evaluasi Tri Wulan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.....	18
Tabel 8.3 : Evaluasi Tri Wulan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.....	18
Tabel 8.4 : Evaluasi Tri Wulan Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu.....	18
Tabel 9.1: Perbandingan Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	19
Tabel 9.2 : Perbandingan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.....	19
Tabel 9.3 : Perbandingan Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.....	19
Tabel 9.4 : Perbandingan Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu.....	19
Tabel 10.1 : Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	21
Tabel 10.2 : Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021, 2020 dan 2019.....	22
Tabel.11.1 : Evaluasi Index responden Masyarakat yang puas terhadap	

layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	23
Tabel.11.2 : Perbandingan Index responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	24
Tabel.11.3 : Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 Semester I	24
Tabel.11.4 : Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 Semester II ...	25
Tabel 12. : Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	26
Tabel 13.1 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.....	27
Tabel 13.2 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	27
Tabel 13.3 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	28
Tabel 13.4 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	28
Tabel 13.5 : Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , 2020, dan 2021	28
Tabel 13.6 : Perbandingan Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , 2020, dan 2021	28
Tabel 13.7 : Perbandingan Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , 2020, dan 2021	28
Tabel 13.8 : Perbandingan Persentase salinan putusan Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , 2020, dan 2021	29
Tabel 14.1. : Evaluasi Tri Wulan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah Diputus.....	30
Tabel 14.2 : Perbandingan Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah Diputus.....	31
Tabel 15. : Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019, 2020 dan 2021	37
Tabel 16. : Perbandingan Capaian Nilai LKJIP PT Yogyakarta dan PN Se DIY	40

Daftar Grafik

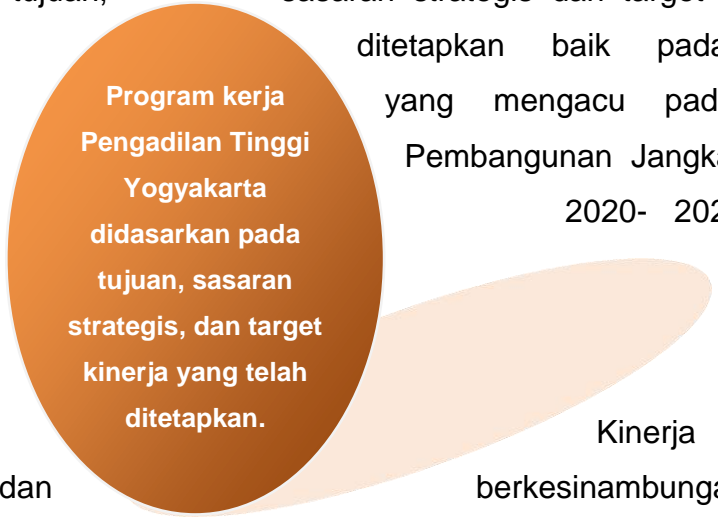
Grafik 1. Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan	14
Grafik 2. Perbandingan Persentase Capaian Target Sisa Perkara yang diselesaikan	16
Grafik 3. Perbandingan Perkara yang diselesaikan tepat waktu	17
Grafik 4. Perbandingan Persentase Capaian Target Perkara yang diselesaikan	20
Grafik 5. Perbandingan capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	21
Grafik 6. Perbandingan Capaian Target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	22
Grafik 7. Perbandingan Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	23
Grafik 8. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	24
Grafik 9. Perbandingan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	27
Grafik 10. : Perbandingan Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	29
Grafik 11. : Perbandingan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30
Grafik 12 . Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	31
Grafik 13.1 : Perbandingan Prosentase Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019,2020 dan 2021	38
Grafik 13.2 : Perbandingan Prosentase Realisasi Anggaran DIPA 03 BADILUM Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019,2020 dan 2021	38
Grafik 14 : Capaian Nilai LKjIP PT Yogyakarta dan PN Se DIY	40

Daftar Gambar

Gambar 1. Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	4
Gambar 3. Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian perkara oleh Panitera	32
Gambar 4. Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan oleh Pimpinan	32
Gambar 5. Tampilan Beranda Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta	33
Gambar 6. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta	33
Gambar 7. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata	34
Gambar 8. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana	34
Gambar 9. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor	35
Gambar 10. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	35
Gambar 11. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata	36
Gambar 12. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana	36

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020- 2024, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana (RPJM) Pembangunan Jangka Menengah Kinerja 2020- 2024, Indikator Rencana Tahunan Utama, Penetapan Kinerja dan konsisten dan berkesinambungan. Kinerja secara



Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021, berbagai pencapaian target indikator kinerja tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Hukum khususnya lembaga peradilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen internal dan dukungan eksternal, baik itu sesama aparat penegak hukum yang lain maupun instansi terkait serta peran serta masyarakat.

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Capaian Sasaran Strategis

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor.	86 % 86 % 86 %	93,1 % 91,9 % 100 %	108,2 % 106,8 % 116 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%	42 %	116,6 %
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%	97,6%	114,8%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%

Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat melebihi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan, diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai bagian dari salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menggunakan dana APBN. Pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada publik adalah tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



Gambar.1 Gedung Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Banding yang diatur dalam undang-undang, dan diperjelas lagi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai *Judicial Power*, yaitu :

- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata ditingkat banding.
- b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi

juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan PERMA Nomor : 7 Tahun 2015.



Gambar.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan

52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata, pidana biasa, pidana anak dan tipikor di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021, sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan, menguraikan mengenai Latar Belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta; dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan

Tinggi Yogyakarta; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAB IV - Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah "*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung*".

Penjelasan :

- a. Pengadilan Tinggi Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Umum di Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi;
- c. Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang;

Sasaran Strategis

Ada 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, adapun sasaran strategis tersebut telah direview setelah di analisis target serta sasaran strategisnya (matriks renstra terlampir).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituangkan dalam 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Untuk merealisasikan Rencana (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguraikannya ke dalam Rencana Kinerja adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2 : Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%
		B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86% 86% 86%
		C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%
		D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%

	Perkara	B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
--	---------	---	------

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja adalah

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 - 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel.3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%
		B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86% 86% 86%
		C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%
		D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.4 : Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86 % 86 % 86 %	93.1 % 91.9 % 100 %	108.2 % 106.8 % 116 %
		C. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36 %	42 %	116.6 %
		D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85 %	97.6 %	114.8 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan peradilan ditingkat banding dengan proses yang pasti, transparan dan akuntabel sesuai dengan Hukum yang berlaku. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator, yaitu

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- d. Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

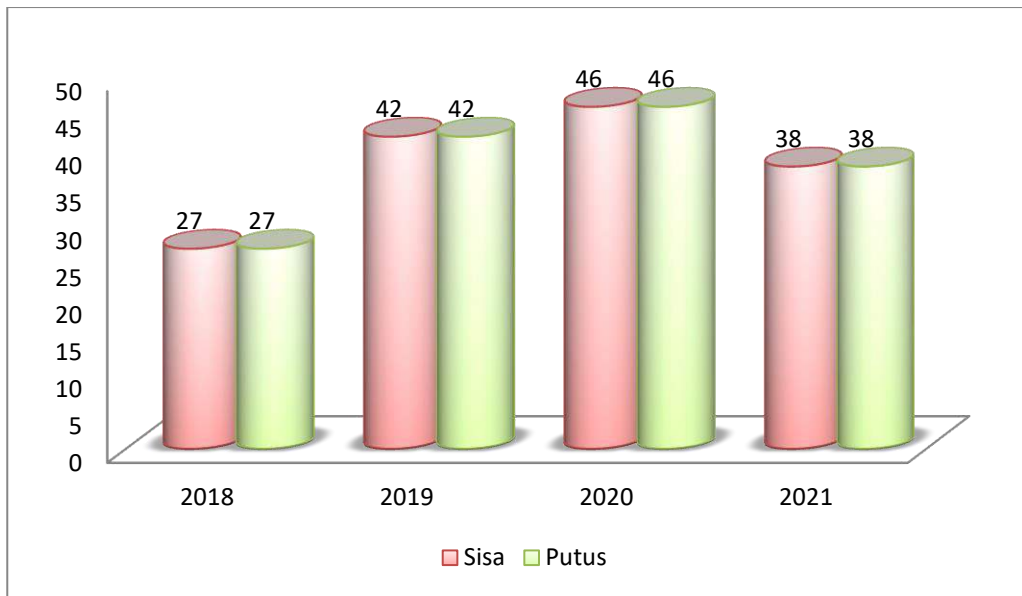
Tabel.5 : Target, Realisasi dan capaian sasaran sasaran Strategis 1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA					
	URAIAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	A.Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Pidana Khusus Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	
B.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					99,79 %	
- Perdata	86 %	93,1 %	108,2 %	98,5 %		
- Pidana	86 %	91,9 %	106,8 %	101,26 %		
- Pidana Khusus Tipikor	86 %	100 %	116 %	90,43 %		
C.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					100 %	
- Kasasi	36 %	42 %	116,6%	89,22 %		
D.Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding		85%	97,6%	114,8%	114,88%	114,6 %

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai 100%, didapat dari target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%, dengan jumlah sisa perkara tahun lalu berjumlah 38 perkara dan diselesaikan 38 perkara pada triwulan I tahun 2021. Penyelesaian sisa perkara dengan perbandingan 3 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 1. Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan



Salah satu langkah untuk mencapai target penyelesaian sisa perkara dilakukan monitoring dan evaluasi tiap triwulan oleh Panitera dan para Panitera Muda sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :

Tabel.6.1 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan s/d triwulan	Sisa Yang Diselesaikan s/d triwulan	Realisasi
2021	I	38	38	100%
	II	38	38	100%
	III	38	38	100%
	IV	38	38	100%

Keterangan : Sisa perkara Tahun lalu semua sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.2 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara **Perdata** yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan s/d triwulan	Sisa Yang Diselesaikan s/d triwulan	Realisasi
2021	I	24	24	100%

	II	24	24	100%
	III	24	24	100%
	IV	24	24	100%

Keterangan : Sisa perkara Perdata Tahun lalu sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.3 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara **Pidana** yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan s/d triwulan	Sisa Yang Diselesaikan s/d triwulan	Realisasi
2021	I	12	12	100%
	II	12	12	100%
	III	12	12	100%
	IV	12	12	100%

Keterangan : Sisa perkara Pidana Tahun lalu sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Tabel.6.4 : Evaluasi Tri Wulan Sisa Perkara **Tipikor** yang diselesaikan

Tahun	Tri Wulan	Sisa Yang Harus Diselesaikan s/d triwulan	Sisa Yang Diselesaikan s/d triwulan	Realisasi
2021	I	2	2	100 %
	II	2	2	100 %
	III	2	2	100 %
	IV	2	2	100 %

Keterangan : Sisa perkara Tipikor Tahun lalu sudah diselesaikan pada tri wulan ke I.

Analisa keberhasilan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100% dari jumlah sisa perkara tahun lalu dapat diselesaikan semuanya yaitu 38 perkara dan diselesaikan pada triwulan I tahun 2021. Sehingga persentase capaian untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2020-2024. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor :

- a. Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.
- b. Masing-masing majelis hakim telah membuat *court calender*.
- c. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.
- d. Sumberdaya Manusia yang menangani perkara di Pengadilan Tinggi

Yogyakarta sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

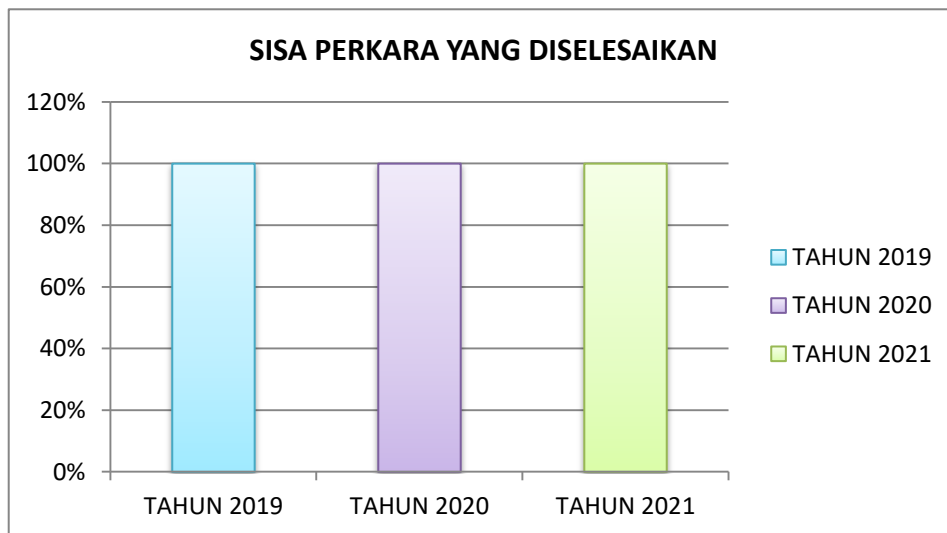
- e. Jumlah sisa perkara tahun lalu lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
- f. Penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

Tabel 7.1 : Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	38	38	100%	100%	100%
2020	46	46	100%	100%	100%
2019	42	42	100%	100%	100%

Grafik 2. Perbandingan Persentase Capaian Target Sisa Perkara yang diselesaikan



Tabel 7.2 : Perbandingan Sisa Perkara **Perdata** yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	24	24	100%	100%	100%
2020	27	27	100%	100%	100%
2019	31	31	100%	100%	100%

Tabel 7.3 : Perbandingan Sisa Perkara **Pidana** yang diselesaikan

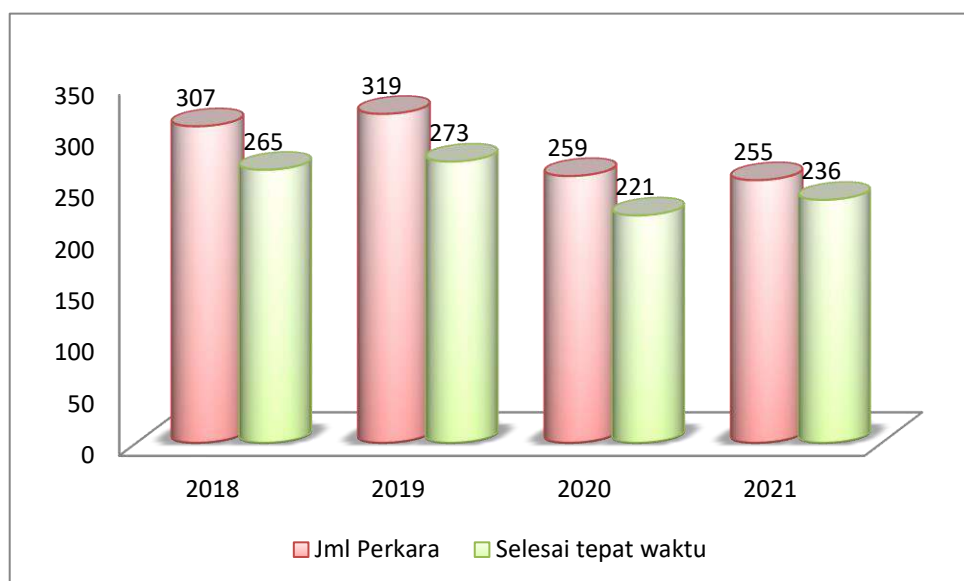
Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	12	12	100%	100%	100%
2020	19	19	100%	100%	100%
2019	11	11	100%	100%	100%

Tabel 7.4 : Perbandingan Sisa Perkara **Tipikor** yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	2	2	100%	100 %	100%
2020	-	-	100%	-	100%
2019	-	-	100%	-	100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 107,6%, didapat dari target yang ditetapkan 86% dan terealisasi 92,54%, dengan jumlah 255 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun lalu berjumlah 38 perkara dan 217 perkara yang masuk pada tahun 2021. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perbandingan 3 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 3. Perbandingan Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Untuk mencapai target penyelesaian perkara tepat waktu, salah satu langkah yang ditempuh yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi perkara yang diselesaikan tepat waktu yang dilakukan tiap triwulan oleh Panitera dan para Panitera Muda sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 8.1 :Evaluasi Tri Wulan Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk s/d Triwulan	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan s/d Triwulan	Realisasi
2021	I	38	51	65	73,03%
	II	38	104	123	86,61%
	III	38	145	173	94,53%
	IV	38	207	236	96,32%

Tabel 8.2 : Evaluasi Tri Wulan Perkara **Perdata** yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk s/d Triwulan	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan s/d Triwulan	Realisasi
2021	I	24	23	32	68,08%
	II	24	52	65	88,52%
	III	24	68	86	93,47%
	IV	24	92	108	93,1%

Tabel 8.3 : Evaluasi Tri Wulan Perkara **Pidana** yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk s/d Triwulan	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan s/d Triwulan	Realisasi
2021	I	12	27	30	76,92 %
	II	12	51	55	87,3 %
	III	12	86	84	85,71 %
	IV	12	124	125	91,91 %

Tabel 8.4 : Evaluasi Tri Wulan Perkara **Tipikor** yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Masuk s/d Triwulan	Perkara Yang Putus di Tahun Berjalan s/d Triwulan	Realisasi
2021	I	2	1	3	100 %
	II	2	1	3	100 %
	III	2	1	3	100 %
	IV	2	1	3	100 %

Tabel 9.1 : Perbandingan Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi	Capaian
2021	236	255	86 %	92,54%	107,6%
2020	221	259	86%	85,32%	99,20%
2019	273	319	85,76%	85,58%	99,79%

Tabel 9.2 : Perbandingan Persentase perkara **Perdata** yang diselesaikan tepat waktu

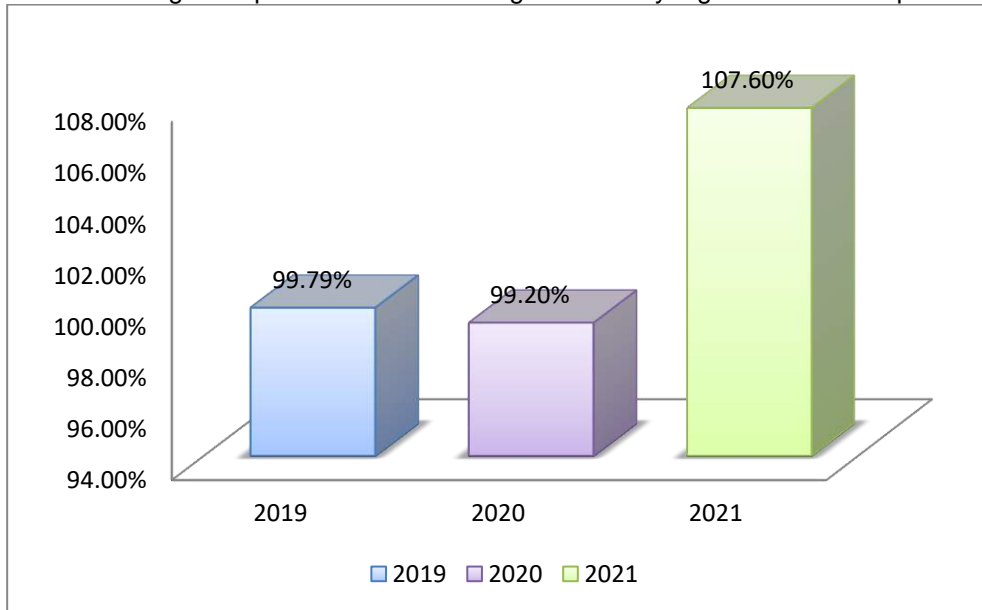
Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	108	116	86 %	93,1 %	108,25 %
2020	133	157	86 %	84,71 %	98,5 %
2019	156	183	85,76 %	85,24 %	99,39 %

Tabel 9.3 : Perbandingan Persentase perkara **Pidana** yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	125	136	86 %	91,91 %	106,87 %
2020	81	93	86 %	87,09 %	101,26 %
2019	119	135	85,76 %	88,14 %	102,78 %

Tabel 9.4 : Perbandingan Persentase perkara **Tipikor** yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	3	3	86 %	100 %	116,27 %
2020	7	9	86%	77,77%	90,43%
2019	1	1	85,76%	100%	116,60%

Grafik 4. Perbandingan Capaian Persentase Target Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Analisa keberhasilan :

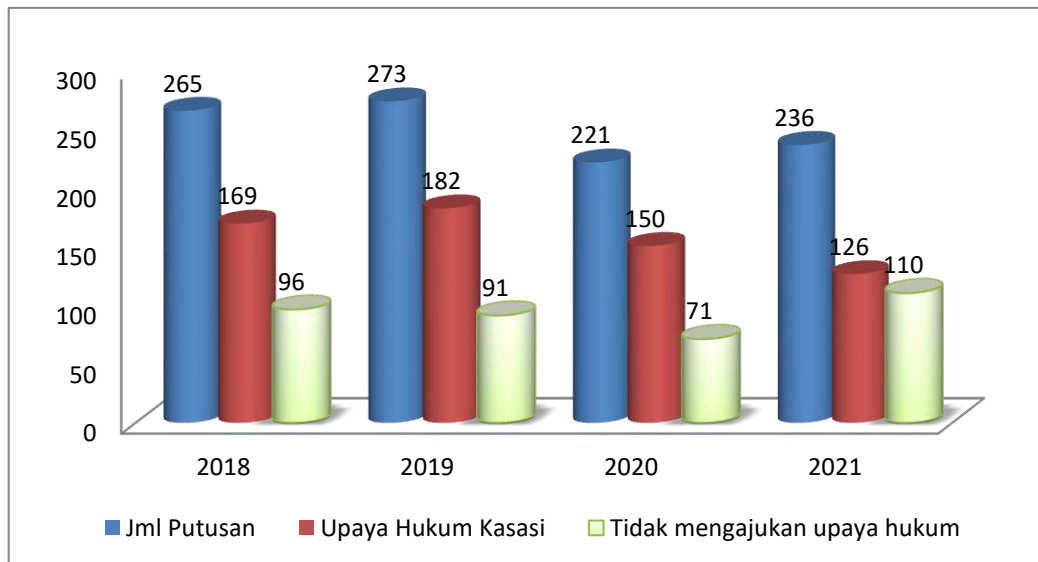
Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 86%, jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 236 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 255 perkara. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 92,54% dan memperoleh capaian sebanyak 107,6% . Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 86%. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 karena dipengaruhi oleh faktor-faktor :

- a. Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.
- b. Masing-masing majelis hakim telah membuat *court calender*.
- c. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.
- d. Sumberdaya Manusia yang menangani perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 129,47%, didapat dari target yang ditetapkan 36% dan terealisasi 46,61%, dari 236 putusan pada tahun 2021 terdapat 126 mengajukan upaya hukum kasasi dan 110 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 46,61% dan capaiannya adalah 129,47%. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan 3 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 5. : Perbandingan capaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Untuk mencapai target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap triwulan oleh Panitera dan para Panitera Muda sebagaimana tabel dibawah ini :

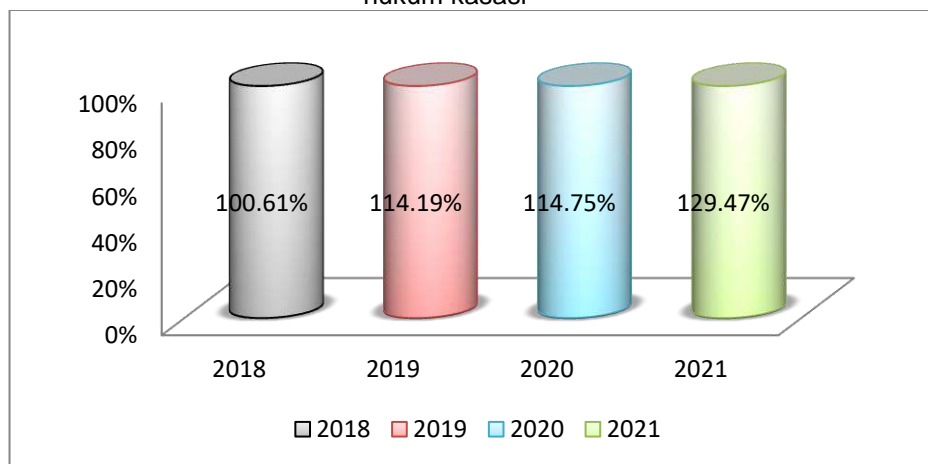
Tabel 10.1 : Evaluasi Tri Wulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Tri Wulan	Putus Banding	Yang Mengajukan Upaya Hukum s/d triwulan	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum s/d triwulan	Presentase (%)
2021	I	64	42	22	34,37%
	II	122	61	61	50%
	III	172	94	78	45,34%
	IV	236	126	110	46,61%

Tabel 10.2 : Perbandingan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021, tahun 2020 dan tahun 2019

Tahun	Jumlah Putusan	Yang mengajukan upaya hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	236	126	110	36 %	46,61%	129,47%
2020	221	150	71	28%	32,13%	114,75%
2019	270	159	111	36%	41.11%	114.19%
2018	265	169	96	36%	36,22%	100,61%

Grafik 6. ; Perbandingan Capaian Target Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



Analisis keberhasilan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 36%, jumlah putusan tahun berjalan sebanyak 236 perkara dari jumlah putusan tersebut 126 mengajukan upaya hukum kasasi dan 110 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 46,61% dan memperoleh capaian sebanyak 129,47%. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 36%. Tercapainya target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 karena dipengaruhi oleh faktor-faktor :

- a. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.
- b. Sumberdaya Manusia yang menangani perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Peningkatan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap

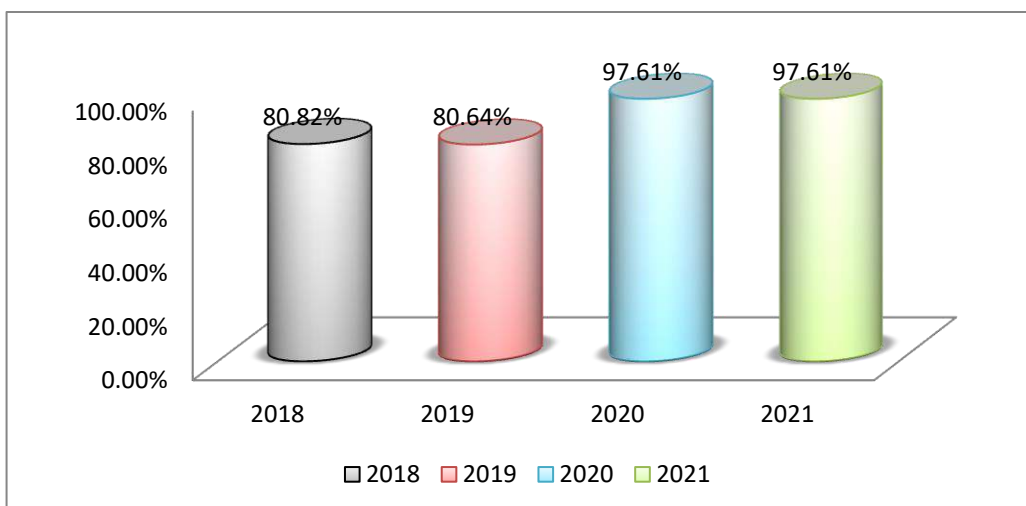
putusan pengadilan.

- d. Peningkatan pemahaman masyarakat pencari keadilan terhadap hukum.

d. Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Capaian Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencapai 114,88 %, didapat dari target yang ditetapkan 85% dan terealisasi 97,65%. Capaian Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perbandingan 3 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 7. : Perbandingan Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Untuk mencapai target Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dilakukan usaha perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM dalam melayani, peningkatan mutu pelayanan dan evaluasi paska survei kepuasan masyarakat oleh Pimpinan.

Tabel.11.1 : Evaluasi Index responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Semester I	85 %	97,65 %	114,88 %
Semester II	85 %	97,61 %	114,83 %

Tabel.11.2 : Perbandingan Index responden Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	80%	80,82%	101,02%
2019	85 %	84 %	98,8 %
2020	85 %	97,65 %	114,88 %
2021	85 %	97,61 %	114,83 %

Grafik 8.

Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Tabel.11.3 : Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 Semester I

<p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Periode 1 Tahun 2021 NILAI : 97,61/3,90</p> <p>Dalam skala A (Sangat baik): 81,25 - 100 : 3,25 – 4,00</p>

Tabel.11.4 : Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 Semester II

<p>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Periode 2 Tahun 2021</p> <p style="background-color: yellow;">NILAI : 97,61/3,90</p> <p style="background-color: yellow;">Dalam skala A (Sangat baik): 81,25 - 100 : 3,25 – 4,00</p>

Analisa keberhasilan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%, dan terealisasi 97,61%,. dan memperoleh capaian sebanyak 114,83 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85%. Tercapainya target Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2021 karena dipengaruhi oleh faktor-faktor :

- a. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.
- b. Sumberdaya Manusia pelayanan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.
- c. Sarana dan prasarana pelayanan sudah memadai
- d. Kualitas pelayanan sudah baik, prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) selalu diterapkan dalam setiap layanan.

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu,
- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

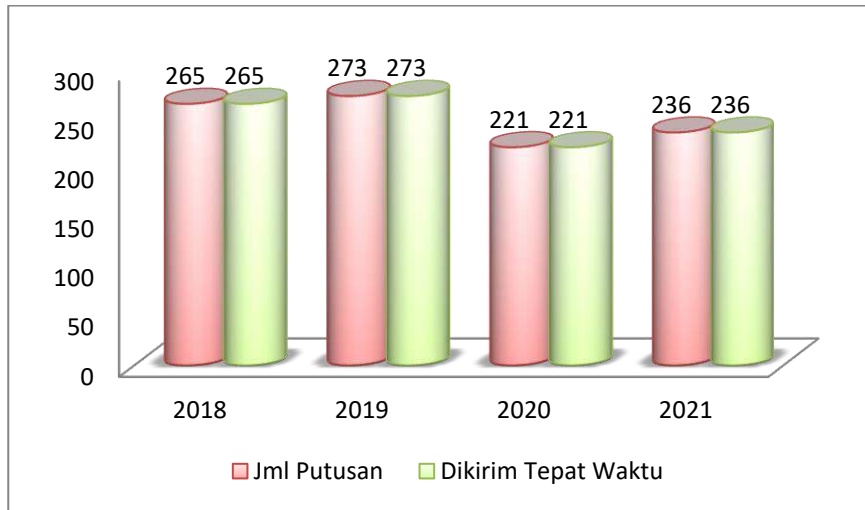
Tabel 12. : Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA					
	URAIAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	- Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus (Tipikor)	100%	100%	100%	100%	120%

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula sebagai berikut :

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100 %, didapat dari target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%. Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan perbandingan 3 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 9.Perbandingan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Untuk mencapai target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dilakukan usaha peningkatan kompetensi SDM dalam melayani, peningkatan mutu pelayanan serta monitoring dan evaluasi oleh Panitia dan para Panmud sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 13.1 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan s/d Triwulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu s/d Triwulan	Persentase
2021	I	65	65	100%
	II	123	123	100%
	III	173	173	100%
	IV	236	236	100%

Tabel 13.2 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan **Perdata** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan s/d Triwulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu s/d Triwulan	Persentase
2021	I	32	32	100%
	II	65	65	100%
	III	86	86	100%
	IV	108	108	100%

Tabel 13.3 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan **Pidana** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan s/d Triwulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu s/d Triwulan	Persentase
2021	I	30	30	100%
	II	55	55	100%
	III	84	84	100%
	IV	125	125	100%

Tabel 13.4 : Evaluasi Tri Wulan Persentase salinan putusan **Tipikor** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Tri Wulan	Jumlah Putusan s/d Triwulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu s/d Triwulan	Persentase
2021	I	3	3	100%
	II	3	3	100%
	III	3	3	100%
	IV	3	3	100%

Tabel 13.5 : Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , tahun 2020, dan tahun 2021

Tahun	Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2021	236	236	100%	100%	100%
2020	221	221	100%	100%	100%
2019	273	273	100%	100%	100%

Tabel 13.6 : Perbandingan Persentase salinan putusan **Perdata** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , tahun 2020, dan tahun 2021

Tahun	Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2021	108	108	100%	100%	100%
2020	133	133	100%	100%	100%
2019	156	156	100%	100%	100%

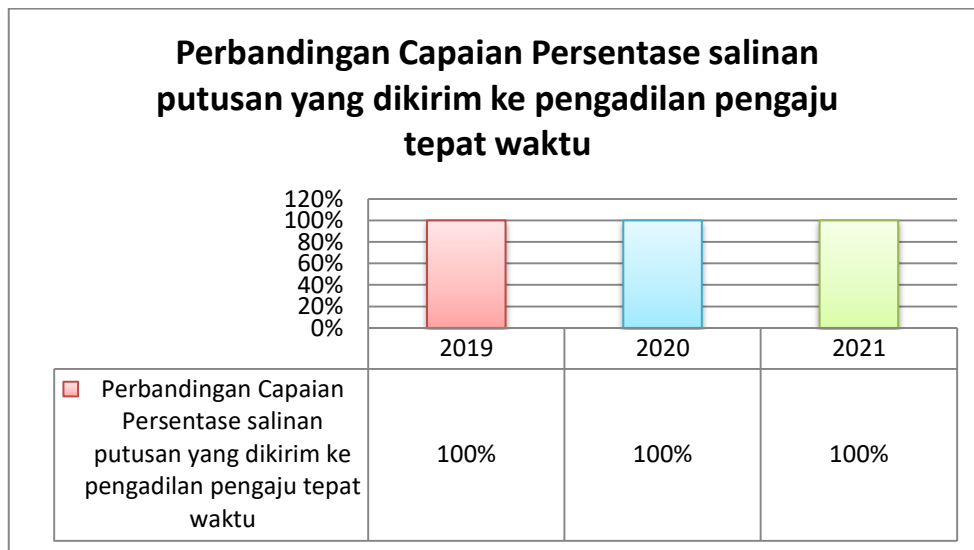
Tabel 13.7 : Perbandingan Persentase salinan putusan **Pidana** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , tahun 2020, dan tahun 2021

Tahun	Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2021	125	125	100%	100%	100%
2020	81	81	100%	100%	100%
2019	116	116	100%	100%	100%

Tabel 13.8 : Perbandingan Persentase salinan putusan **Tipikor** yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2019 , tahun 2020, dan tahun 2021

Tahun	Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2021	3	3	100%	100%	100%
2020	7	7	100%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%

Grafik 10. :Perbandingan Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu



Analisa keberhasilan mencapai target :

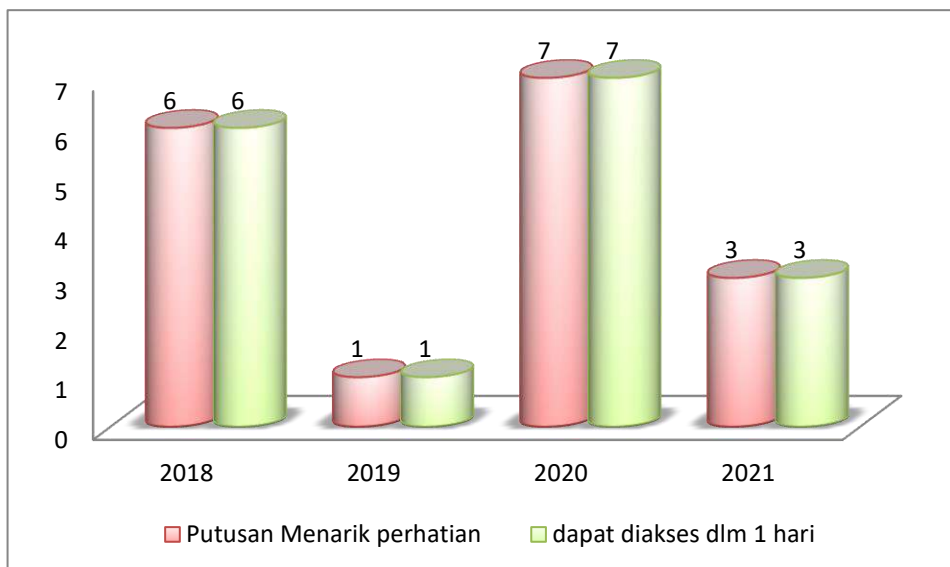
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah 100% dari target 100%, maka capaian kinerjanya 100% dari target yang ditetapkan sesuai dengan target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 dan target 2021. Tercapainya target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Sumberdaya Manusia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kerjasama yang baik para pihak terkait dalam pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dan dilaksanakan sesuai SOP.
- d. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus mencapai 100 %, didapat dari target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%. Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus dengan perbandingan 3 tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 11. : Perbandingan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



Untuk mencapai target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dilakukan usaha peningkatan kompetensi SDM dalam melayani, peningkatan mutu pelayanan serta monitoring dan evaluasi oleh Panitera dan para Panmud sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 14.1. : Evaluasi Tri Wulan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

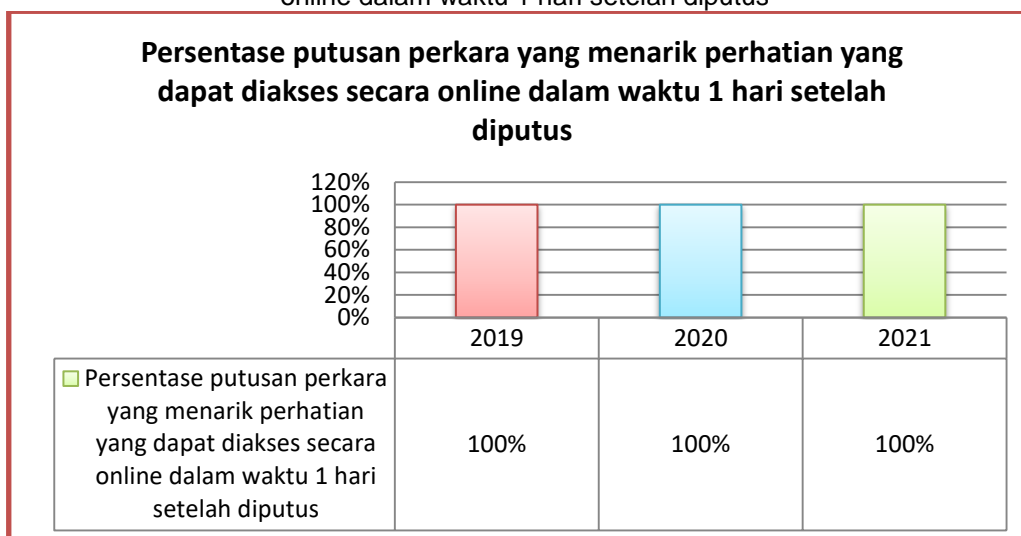
Tahun	Tri Wulan	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang di upload dalam website s/d Triwulan	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Persentase

2020	I	3	3	100%
	II	3	3	100%
	III	3	3	100%
	IV	3	3	100%

Tabel 14.2 : Perbandingan Persentase putusan perkara Tipikor yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Jumlah isi putusan perkara yang di upload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
2021	3	3	100%	100%	100%
2020	7	7	100%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%

Grafik 12 . Persentase putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



Analisa keberhasilan mencapai target :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah 100% dari target 100%, maka capaian kerjanya 100% dari target yang ditetapkan sesuai dengan target jangka menengah Rencana Strategis 2020-2024 dan target 2021. Tercapainya target Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung :

- a. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai.
- b. Sumberdaya Manusia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan perturan

- yang berlaku.
- c. Kerjasama yang baik para pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online dan sesuai dengan SOP.
 - d. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.
 - e. Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat hanya sedikit.

Gambar 3. Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian perkara oleh Panitera



Gambar 4. Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan oleh Pimpinan



Gambar 5. Tampilan Beranda Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 6. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 7. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

No	No Putusan	Permasalahan Banding	Tanggal Putusan	Status	Detail
1	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman		Status Putusan: Bekas Putusan	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 28 Desember 2023			
2	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman		Status Putusan: Bekas Putusan	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 28 Februari 2023			
3	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman		Status Putusan: Bekas Putusan	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 28 Februari 2023			
4	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman		Status Putusan: Bekas Putusan	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 28 Februari 2023			

Gambar 8. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

No	No Putusan	Permasalahan Banding	Tanggal Putusan	Status	Detail
1	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman	Pengadilan	Status Putusan: Bekas Putusan	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 28 Desember 2023			
2	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman	Pengadilan	Status Putusan: Bekas Putusan	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 28 Desember 2023			
3	No Putusan PT: LPT/2023/PT/MS	Aud PT: PK Darman	Tunggal Putusan Lain	Status Putusan: Sudah Putusan Tanggal Putusan: 03 Januari 2023 Anas' Singkal: Hutan Kertan Dab. Putusan: Kartika	Detail
	No Putusan PB: LPT/2023/PT/MS	Tunggal Permasalahan: 27 November 2023			

Gambar 9. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor



Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Gambar 10. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 11. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata

No. Urut	No. Register Perkara	Nama Tergugat	No. Register Bk	No. Register Pt	Instansi	Tgl. Pendaftaran Perkara	Tgl. Putusan Pengadilan
1	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuf Ferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	11/PT/02014/PT/14	Badan Pengkajian dan Pengelolaan Sampah	03 Des 2011	20 Feb 2014
2	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	04 Feb 2011	15 Jan 2014
3	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	11/PT/02014/PT/14	Perumahan	10 Feb 2011	20 Dec 2013
4	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan dan Pengelolaan Sampah	08 Feb 2011	20 Feb 2014
5	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	04 Feb 2011	20 Feb 2014
6	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	11/PT/02014/PT/14	Perumahan dan Pengelolaan Sampah	03 Feb 2011	04 Dec 2013
7	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan dan Pengelolaan Sampah	03 Feb 2011	12 Feb 2014
8	PERKARA PERDATA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	03 Feb 2011	16 Jan 2014

Gambar 12. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana

No. Urut	No. Register Perkara	Nama Tergugat	No. Register Bk	No. Register Pt	Instansi	Tgl. Pendaftaran Perkara	Tgl. Putusan Pengadilan
1	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	03 Nov 2011	10 Jan 2014
2	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	09 Nov 2011	10 Jan 2014
3	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	08 Dec 2011	10 Feb 2014
4	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan dan Pengelolaan Sampah	03 Apr 2011	12 Jan 2014
5	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan dan Pengelolaan Sampah	08 Feb 2011	20 Dec 2013
6	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	11/PT/02014/PT/14	Perumahan	03 Jan 2011	10 Feb 2014
7	PERKARA PIDANA YOGYAKARTA	Yusuferryadi dan Rahmi Yudianto dan Wahid Mulya	02/PT/02015/PT/14	02/PT/02014/PT/14	Perumahan	08 Apr 2011	16 Jan 2014

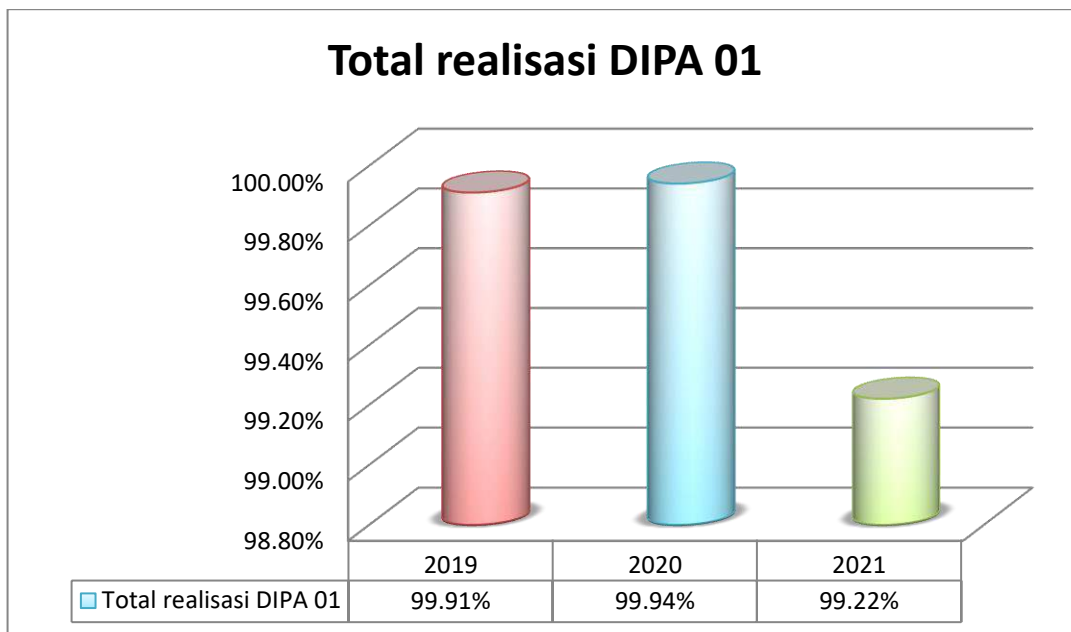
B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring secara berjenjang dan berkala, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

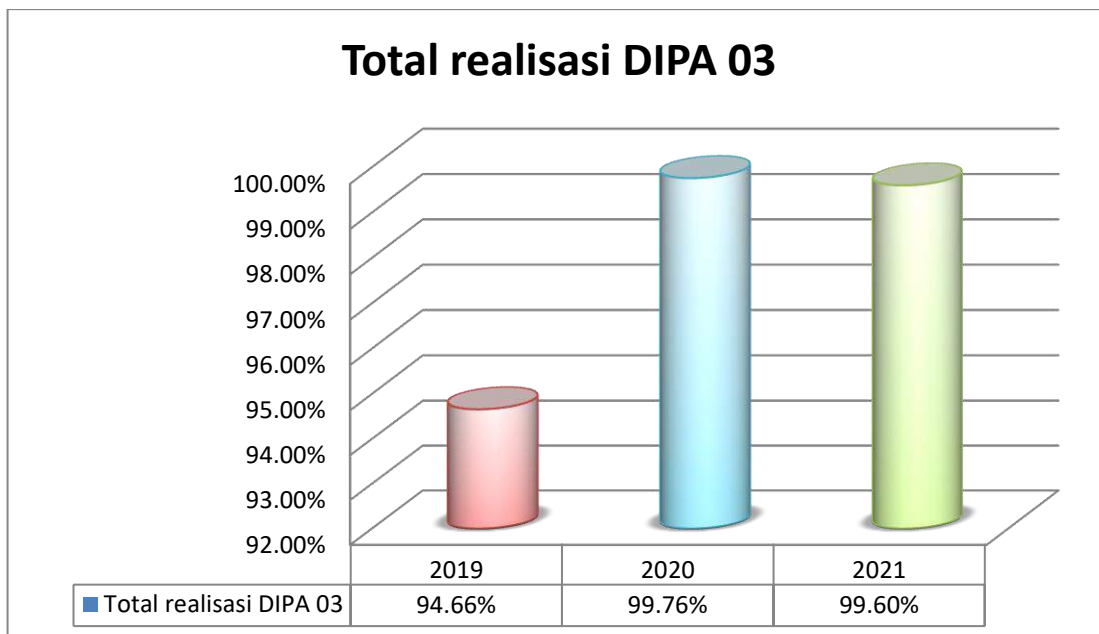
Tabel 15. : Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019,2020 dan 2021

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU	Realisasi		PAGU	Realisasi		PAGU	Realisasi	
		RP	Rp.	%	RP	Rp.	%	RP	Rp.	%
1	DIPA 01 BUA									
	a. Belanja Pegawai	35,279,775,000	35,362,861,321	99.95	32,853,739,000	32,833,297,870	99.94	35,642,913,000	35,333,888,351	99.13
	b. Belanja Barang Operasional	2,027,595,000	2,013,650,538	99.31	3,030,778,000	3,030,563,408	99.99	2,863,845,000	2,861,273,369	99.91
	c. Belanja Barang Non Operasional	37,700,000	37,300,000	98.94	229,598,000	229,904,000	99.98	234,958,000	234,661,470	99.87
	d. Belanja Modal	209,500,000	208,144,000	99.35	104,335,000	103,840,000	99.53	1,477,500,000	1,477,466,560	100
	JUMLAH	37,554,570,000	37,621,955,859	99.91	36,218,450,000	36,197,605,278	99.94	40,219,216,000	39,907,289,750	99.22
2	DIPA 03 BADILUM									
	b. Belanja Barang	108,585,000	102,787,300	94.66	190,525,000	190,065,900	99.76	255,275,000	254,260,383	99.6
	JUMLAH	108,585,000	102,787,300	94.66	190,525,000	190,065,900	99.76	255,275,000	254,260,383	99.6

Grafik 13.1 : Perbandingan Prosentase Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019,2020 dan 2021



Grafik 13.2 : Perbandingan Prosentase Realisasi Anggaran DIPA 03 BADILUM Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2019,2020 dan 2021



Keterangan :

- a. Program Dukungan Manajemen
 - 1. Belanja Pegawai

Terdapat penurunan penyerapan anggaran sebesar 0.81% untuk belanja pegawai karena adanya hakim/pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan mutasi keluar pada tahun 2021.

2. Belanja Barang Operasional
Belanja barang operasional mengalami penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,08% pada tahun 2021 namun capaian rincian output telah 100%.
 3. Belanja Barang Non Operasional
Untuk belanja barang non operasional mengalami penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,11% karena adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara penuh di tahun 2021, karena pandemi covid-19, menyesuaikan kondisi pandemi di daerah masing-masing.
- b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,06% untuk belanja modal karena perencanaan belanja modal telah memperhitungkan kenaikan harga, sehingga pelaksanaan belanja modal sesuai dengan perencanaan.
 - c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Terjadi Penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,16% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (DIPA Badilum) karena menurunnya volume perkara pada tahun 2021.

C. PENGELOLAAN SAKIP

Sejalan dengan tujuan pemerintah yang fokus pada peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja yang berorientasi hasil (outcome) diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan efektif dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun komponen SAKIP antara lain :

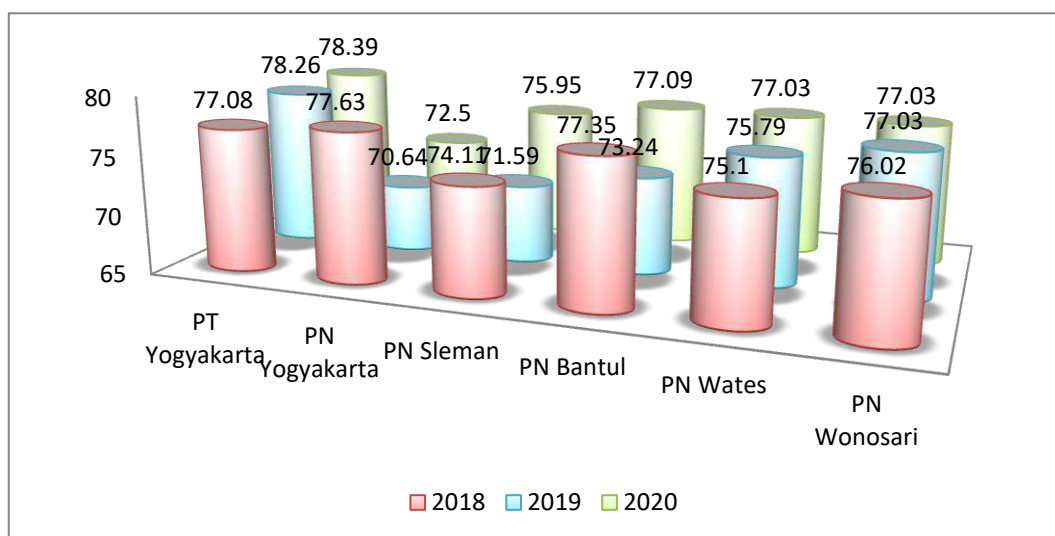
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Strategis (Renstra)
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- d. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pada tahun 2021, untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 nilai yang diperoleh oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 16 : Perbandingan Capaian Nilai LKjIP PT Yogyakarta dan PN Se DIY

No	Satuan Kerja	LKjIP 2018		LKjIP 2019		LKjIP 2020	
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai
1	PT Yogyakarta	77.08	BB	78.26	BB	78.39	BB
2	PN Yogyakarta	77.63	BB	70.64	BB	72.50	BB
3	PN Sleman	74.11	B	71.59	BB	75.95	BB
4	PN Bantul	77.35	BB	73.24	BB	77.09	BB
5	PN Wates	75.1	BB	75.79	BB	77.03	BB
6	PN Wonosari	76.2	BB	77.03	BB	77.03	BB

Grafik 14 : Capaian Nilai LKjIP PT Yogyakarta dan PN Se DIY



Sesuai dengan data tersebut secara umum seluruh satker mengalami kenaikan skor penilaian LKjIP dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani SAKIP, dengan adanya bimtek atau diklat yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun oleh Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Menpim yang mengadakan diklat secara online.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 ini menyajikan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2021 yang dituangkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan alat ukur 6 (enam) Indikator Kinerja. Seluruh sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari 6 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan semua berhasil mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaian 3 Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Capaian kinerja tersebut dipengaruhi dan didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan untuk selalu melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
2. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia.
4. Peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. SARAN

1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021 dijadikan pijakan untuk menentukan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan guna mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Kebijakan yang telah diambil pada tahun 2021 yang secara nyata dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta supaya dipertahankan.
3. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana dengan optimal apabila seluruh sumberdaya saling bersinergi, saling mengisi, terencana, sistematis dan terprogram secara komprehensif.

Daftar Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Rencana Kinerja Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Matriks Rencana Strategis 2020 –2024
5. Pengukuran Kinerja
6. SK Penyusunan LKjIP Tahun 2021
7. Prestasi Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021

Lampiran 1

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta

REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Wojo, bangunharjo, sewon, Bantul
Telp. (0274)4396412 Fax. (0274)4396415
Email : pt.yogya@gmail.com Website : pt-yogyakarta.go.id
YOGYAKARTA 55187



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W.13.U/24/SK/WKPT/I/2022

Tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung tertanggal 13 Desember 2021 Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 6 Januari 2022



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

[Handwritten Signature]
GATOT SUHARNOTO, SH. *[Initials]*

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 Nomor : W.13.U / 24 / SK / WKPT / I / 2022
 Tanggal : 6 Januari 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan ditambah jumlah perkara yang diterima dan diputus pada tahun berjalan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi 	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Kasasi • Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah isi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses masyarakat dalam waktu 1(satu) hari setelah putus $\frac{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}}{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses masyarakat dalam waktu 1(satu) hari setelah putus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke SIPP dalam satu hari setelah diputus • Maklumat Ketua MA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 6 Januari 2022

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Zatoh

GATOT SUHARNOTO, SH.

Lampiran 2

Rencana Kinerja Tahun 2021

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KET
							JUMLAH	SATUAN		
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang terselesaikan	160	Perkara	Rp.216.205.000	Kepaniteraan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85,76%							
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%							
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. PK	36%							
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	80,26							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KET
							JUMLAH	SATUAN		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%							
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%							

Yogyakarta, Januari 2020

Rektor Pengadilan Tinggi Yogyakarta



H. SURIPTO, S.H., M.H.

NIP.19541005 198103 1 006

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIPTO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 6 Januari 2021



Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

(PRIM HARYADI, S.H., M.H.)



Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

(SURIPTO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86% 86% 86%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi	36%
		d. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%

Jumlah Anggaran : Badan Urusan Administrasi Rp. 38.650.471.000
: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Rp. 227.205.000

Yogyakarta, 6 Januari 2021

 (SIPRI HARYADI, S.H., M.H.)
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

 (SURIPTO, S.H., M.H.)
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Lampiran 4

Matriks Rencana Strategis 2020 –2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024.

- Misi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung
 Visi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGIS			ANGGARAN
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Penyelesaian Putusan Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	129.720.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	87%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86%	86%	86%	90%	86%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	37%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36%	36%	36%	40%	36%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Putusan Perkara Banding		
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	88%		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	85%	86%	86%	95%	87%	Mengumpulkan Responden dari Para Pencari Keadilan/masyarakat melalui proses Survey (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat)			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	16.875.000	
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan Sistem Informasi Berbasis IT untuk meningkatkan Pelayanan Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Publikasi Putusan Perkara dalam Waktu 1 hari setelah diuputus	459.000.000



Lampiran 5

Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus Tipikor	86 % 86 % 86 %	93.1 % 91.9 % 100 %	108.2 % 106.8 % 116 %
		C. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	36 %	42 %	116.6 %
		D. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	85 %	97.6 %	114.8 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		B. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %

Lampiran 6

SK Penyusunan LKjIP Tahun 2021



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/03/SK/WKPT/11/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2021.
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021.
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2022

WAKIL KETUA

GATOT SUHARNOTO, S.H. ¶



Lampiran: Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/03 /SK/WKPT/I/2022
Tanggal : Januari 2022

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

No	JABATAN	TUGAS/ WEWENANG
1	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2	Panitera	Ketua Tim
3	Sekretaris	Sekretaris
4	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Panitera Muda Tipikor	Anggota
8	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota
13	Kasubbag TU dan RT	Anggota
14	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Operator
15	Analisis Perencanaan Anggaran	Operator


WAKIL KETUA
GATOT SUHARNOTO, S.H.

Lampiran 7

Prestasi Pengadilan Negeri di wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Berikut adalah prestasi dan penghargaan Pengadilan Negeri Bantul 2021

1. Wilayah Bebas dari Korupsi (KemenPAN-RB)
2. Peringkat terbaik VII Pelaksanaan Gugatan Sederhana (MA RI)
3. Predikat A (excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu (BADILUM)
4. Instansi Tangguh Bencana (BPBD)
5. Penghargaan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik (Balai Bahasa)
6. Penghargaan atas Dukungan pelaksanaan Pemilu (KPU Kab Bantul)
7. Nilai Tinggi Indeks Persepsi Anti Korupsi (3,96) dan Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (3,83)



Piagam Predikat WBK



Anugerah Pengadilan Terbaik Peringkat VII Pelaksanaan Gugatan Sederhana Mahkamah Agung RI



Sertifikat A (Excellent) APM



Sertifikat A (Excellent) APM 2021



Piagam Penghargaan KPU



Nilai IPKP dan IPAK



Instansi Tangguh Bencana (BPBD)



Penghargaan Bahasa Ruang Publik

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JUARA I APARAT PENEGAK HUKUM RAMAH ANAK DARI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH KOTA YOGYAKARTA



JUARA I LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KATEGORI PENGADILAN NEGERI
KELAS I A TAHUN 2021



PENGADILAN TERBAIK TINGKAT I DALAM PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA PADA
KATEGORI PERADILAN UMUM KELAS I A



EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DENGAN PREDIKAT A



EVALUASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM DENGAN PREDIKAT A
(EXCELLENT)



APRESIASI KATEGORI TERBAIK DALAM INOVASI LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DARI
YAYASAN SAPDA



APRESIASI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM Mendukung Penyediaan Informasi
PADA APLIKASI E-ADVOKASI



PENGHARGAAN TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI WONOSARI

EVALUASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADILUM DENGAN PREDIKAT "A" (EXCELLENT)



JUARA 3 LOMBA PTSP BADILUM KATEGORI PN KELAS 2



**PENGHARGAAN TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI WATES**

1. Juara Pertama Kategori Terbaik PTSP Pengadilan Umum Kelas IB



2. Juara Pelaksanaan Mediasi Kategori Peradilan Umum Kelas IB



3. Nilai "A" (Excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021



PENGHARGAAN & PRESTASI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

- PENGADILAN NEGERI SLEMAN MERAH PREDIKAT NILAI "A" PADA AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 02/DJU/SK/OT01.3/1/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :)
Mengingat :) dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022



Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Sleman



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Inkarnasi Elektronik dari/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 02/DJU/SK/OT01.3/1/2022
TANGGAL 6 JANUARI 2022**

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI 2020	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1 s/d 67	dst.				
68	Pengadilan Negeri Sleman	IA	695	705	A
69 s/d 90	dst.				



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**